

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber pendukung sebagai acuan maupun perbandingan oleh peneliti terkait dengan fokus penelitian yang relatif sama. Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penelitian selanjutnya dalam penulisan Karya Ilmiah Akhir. Adapun penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut:

- a. Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 oleh Agus Harto Wibowo yang merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan pendekatan studi kasus dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan secara lebih mendalam mengenai perencanaan partisipatif yang dilaksanakan di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah dalam proses perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah hanya dilakukan pada tahap penyelidikan dan perumusan masalah, sedangkan pada tahap identifikasi daya dukung, menetapkan langkah-langkah rinci dan merancang anggaran masyarakat sekitar tidak ikut dilibatkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan

partisipatif ialah adanya keterlibatan masyarakat, pelaku kebijakan, pemahaman pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan di wilayah Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya keterlibatan seluruh unsur *stakeholders* di wilayah Kecamatan Pemalang dalam proses perencanaan partisipatif mulai dari tahap penyelidikan, perumusan masalah, perumusan tujuan, identifikasi daya dukung, menetapkan langkah-langkah rinci hingga merancang anggaran biaya yang dibutuhkan, kemudian hasil yang diperoleh dari perencanaan partisipatif berupa perencanaan program atau kegiatan, dan dikarenakan kualitas SDM yang ada masih rendah maka hendaknya masyarakat didampingi oleh fasilitator yang nantinya mendampingi dan membimbing masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan partisipatif.

b. Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makassar

Penelitian ini dilakukan oleh Muh Arrumi Achmad, dkk pada tahun 2014 yang merupakan mahasiswa Universitas Hasanudin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Objek penelitian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di Kota Makassar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di Kota Makassar. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah perencanaan partisipatif kurang efektif dalam penyelenggaraan musyawarah

perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di Kota Makassar. Strategi perencanaan partisipatif yang diperlukan adalah: Perda perencanaan partisipatif dan pelebagaan Musrenbang, program pemberdayaan legislator-SDM aparatur birokrasi-SDM kelurahan dan kecamatan serta pemberdayaan partisipasi dan organisasi dan pengembangan keswadayaan, program sosialisasi hasil Musrenbang dan evaluasi program dan rencana kegiatan, program pembentukan kelompok penjangkaran aspirasi di setiap RW/RT/ kelurahan dan kecamatan serta revitalisasi Tudang Sipulung, program pelibatan masyarakat dalam pembahasan hasil Musrenbang di DPRD dan penyusunan Forum SKPD.

c. Strategi Perencanaan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan

Penelitian ini dilakukan oleh Patria Paramanugraha pada tahun 2022 yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode yang digunakan yaitu Pendekatan Kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Unit Pelayanan Puskesmas Kecamatan Labuhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Unit Pelayanan Puskesmas Kecamatan Labuhan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Medan UPT Puskesmas dan Kelurahan Martubung sebagai lini pelayanan masyarakat ditingkat bawah sudah membuat kebijakan yang mengatur tentang program pelayanan kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid 19. Strategi dan pelaksanaan program fasilitas pelayanan kesehatan berperan aktif dalam melakukan

upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Keberhasilan terhadap program yang didukung oleh adanya ketersediaan sarana dan prasarana merupakan capaian terhadap sasaran dan target yang pemerintah telah tetapkan. Tingkat berpartisipasi masyarakat yang maksimal dalam mendukung program yang ada.

d. Strategi Perencanaan Partisipatif dan *Public Relations* Pada Wisata Edukasi Tanaman Obat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Jubung Kabupaten Jember

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Kamilah pada tahun 2022 yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Metode yang digunakan yaitu Pendekatan Kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi perencanaan partisipatif dan *Public Relations* pada wisata edukasi tanaman obat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Jubung Kabupaten Jember.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah strategi perencana partisipatif dan *public relations* di wisara edukasi pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dinilai efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Jubung. Namun, sejak pandemi Covid 19 tidak mengalami peningkatan dalam pendapatan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat Desa Jubung tidak mengalami pemasukan maka dinilai kurang efektif.

e. Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga

Penelitian ini dilakukan oleh Rojaul Huda pada tahun 2020 yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia. Metode yang digunakan yaitu Pendekatan

Kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan tentang implementasi PEL melalui sektor pariwisata di Desa Serang.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini ialah Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Desa Serang melalui sektor pariwisata telah memenuhi enam aspek yang terdapat pada Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pertama, kelompok sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti skema kerja sama dengan melibatkan seluruh elemen yang ada; kedua, memiliki aksesibilitas dan lokasi strategis; ketiga, mendorong pengembangan inovasi dan kerja sama dengan masyarakat; keempat, terdapat agenda berkelanjutan dalam menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat lokal; kelima, pemerintah desa memberikan fasilitas pengembangan dan kerja sama kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Serang; keenam, pariwisata desa Serang dikelola melalui tata aturan yang jelas dan manajemen yang baik. Berikut tinjauan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Relevansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Agus Harto Wibowo (Universitas Diponegoro, 2009)	Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)	Proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Pemalang kurang optimal dikarenakan melibatkan masyarakat hanya dilakukan pada tahap penyelidikan dan perumusan masalah. Terdapat empat faktor yang	Relevansi yang didapat oleh peneliti ialah gambaran proses dan faktor yang mempengaruhi perencanaan partisipatif.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Relevansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			mempengaruhi proses perencanaan partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat, pelaku kebijakan, pemahaman pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.	
2	Muh Arrumi Achmad, dkk (Universitas Hasanudin, 2014)	Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makassar	Perencanaan partisipatif kurang efektif dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di Kota Makassar	Relevansi yang didapatkan oleh peneliti adalah gambaran terkait perencanaan partisipatif dan karakteristik perencanaan partisipatif.
3	Patria Paramanugraha (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)	Strategi Perencanaan Partisipatif Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan	Strategi dan pelaksanaan program fasilitas pelayanan kesehatan berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Keberhasilan terhadap program yang didukung oleh adanya ketersediaan sarana dan prasarana merupakan capaian terhadap sasaran dan target yang pemerintah telah tetapkan. Tingkat berpartisipasi masyarakat yang maksimal dalam mendukung program yang ada.	Relevansi yang didapatkan oleh peneliti adalah bagaimana strategi perencanaan partisipatif diterapkan dalam pembuatan program pencegahan dan penanganan Covid 19.
4	Nur Kamilah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022)	Strategi Perencanaan Partisipatif dan <i>Public Relations</i> Pada Wisata	Strategi perencanaan partisipatif dan <i>public relations</i> di wisata edukasi pada tahun 2017 hingga	Relevansi yang didapatkan oleh peneliti adalah adanya 3 strategi yang dilakukan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Relevansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Edukasi Tanaman Obat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Jubung Kabupaten Jember	tahun 2019 dinilai efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Jubung. Namun, sejak pandemi Covid 19 tidak mengalami peningkatan dalam pendapatan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat Desa Jubung tidak mengalami pemasukan maka dinilai kurang efektif.	oleh pihak pengelola yaitu strategi dengan konsep perencanaan partisipatif, strategi dengan langsung melibatkan masyarakat dalam pengadaan wisata edukasi, dan strategi memenuhi konsep pemberdayaan masyarakat.
5	Rojaul Huda (Universitas Indonesia, 2020)	Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten, Purbalingga	Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Desa Serang melalui sektor pariwisata telah berjalan dengan baik dikarenakan memenuhi enam aspek Pengembangan Ekonomi Lokal menurut Meyer-Stamer (2005: 4), yaitu kelompok sasaran pengembangan ekonomi lokal, faktor lokasi, sinergi, pembangunan berkelanjutan, tata pemerintahan, dan manajemen.	Relevansi yang didapatkan oleh peneliti adalah gambaran terkait pengembangan ekonomi lokal dan implementasi pengembangan ekonomi lokal.

2.2 Teori tentang Perencanaan Partisipatif

a. Pengertian Perencanaan Partisipatif

Suratman (2008) menyatakan perencanaan partisipatif merupakan salah satu proses pembelajaran yang penting bagi masyarakat. Perencanaan partisipatif adalah

perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua *stakeholders* dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Abe (2008) mendefinisikan perencanaan partisipatif sebagai perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, Nurcholis (2009) mendefinisikan perencanaan partisipatif sebagai suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat.

Pendapat di atas juga di dukung oleh pendapat Wibowo (2010), yang menyatakan bahwa perencanaan partisipatif merupakan serangkaian tahapan yang melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat mulai dari identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi hingga menentukan strategi prioritas rencana-rencana yang akan dilakukan, dan membuat keputusan bersama.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif merupakan proses mempersiapkan kegiatan atau agenda dengan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dalam pemecahan permasalahan sehingga dapat mencapai kondisi yang diharapkan, dimana masyarakat dan pihak yang berkepentingan aktif melibatkan diri.

b. Tujuan Perencanaan Partisipatif

Wicaksono dan Sugiarto (2001) menjelaskan tujuan perencanaan partisipatif, yaitu:

- 1) Masyarakat berperan dalam menyusun tujuan dan rencana pembangunan;
- 2) Masyarakat berperan dalam mengidentifikasi, memberikan informasi, dan usulan terkait program-program yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan maupun potensi yang dimiliki;
- 3) Masyarakat berperan dalam menyusun rencana pembangunan.

c. Ciri-ciri Perencanaan Partisipatif

Wicaksono dan Sugiarto (2001) mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif, yaitu:

- 1) Perencanaan memiliki prioritas dan fokus terhadap kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan usulan masyarakat secara terbuka dan saling percaya;
- 2) Perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat secara adil untuk memberikan usulan dan opini;
- 3) Perencanaan dilaksanakan secara dinamis dan mengutamakan kebutuhan maupun kepentingan seluruh *stakeholder* yang terkait, serta dilaksanakan secara aktif dan berkesinambungan;
- 4) Perencanaan menjamin keterlibatan seluruh pihak sehingga terjadi sinergitas;
- 5) Perencanaan memiliki legalitas hukum karena telah mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya atau di atasnya;
- 6) Perencanaan dilakukan secara jelas, detail, mempertimbangkan waktu dan terukur.

Mahi dan Trigurnarso (2017) menjelaskan bahwa ciri-ciri perencanaan partisipatif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan secara terus-menerus.
- 2) Masyarakat atau kelompok masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan permasalahan yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan berharga.
- 3) Proses berlangsungnya berdasarkan kemampuan warga masyarakat itu sendiri.
- 4) Warga masyarakat berperan penting dalam setiap keputusan.
- 5) Warga masyarakat mendapat manfaat dari hasil pelaksanaan perencanaan.

Samsura (2003:2) mengemukakan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

- 1) Adanya perlibatan seluruh *stakeholder*;
- 2) Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat;
- 3) Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*);
- 4) Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

d. Tahapan-tahapan Perencanaan Partisipatif

Djohani (1996) mengemukakan tahapan-tahapan perencanaan partisipatif pada tingkat desa, yaitu:

- 1) Pengorganisasian masalah

Masalah-masalah yang muncul di masyarakat sangat beragam topiknya sehingga perlu dilakukan seleksi dengan proses pengorganisasian masalah.

2) Pembahasan alternatif-alternatif kegiatan

Permasalahan dapat dipecahkan melalui berbagai cara dalam hal ini masyarakat sebaiknya diajak untuk memilih kegiatan yang paling mungkin dilaksanakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

3) Pemilihan kegiatan

Pemilihan kegiatan dilakukan setelah penyusunan alternatif-alternatif kegiatan yang selanjutnya dilakukan rencana tindak lanjut atau rencana kegiatan dengan memilih dari alternatif-alternatif kegiatan mana yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dan dibuat atas kesepakatan bersama.

2.3 Teori tentang Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

a. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat dalam peningkatan taraf hidup melalui aktivitas usaha dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan (Blakely & Leigh, 2010).

Canzanelli (2001:9) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses partisipatif yang mendorong dan memberikan jalan kepada *stakeholders* lokal untuk meningkatkan daya saing lokal dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan yang layak dan menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) pada prinsipnya merupakan proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas baik kota, wilayah regional maupun kota-kota besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat bekerjasama secara kolektif

untuk menciptakan kondisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan generasi yang lebih baik (World Bank, 2001).

Selain itu, menurut Mudrajat (2004) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha, perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran serta keberdayaan jaringan kerja kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Blakely & Leigh, 2010).

International Labour Organization (2005) menjelaskan bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu yang memungkinkan kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pendapat lain mengatakan bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses menyusun beberapa kelembagaan pembangunan di daerah,

peningkatan SDM untuk memperoleh produk-produk yang semakin baik, juga pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah adalah upaya pemerintah daerah bersama masyarakat daerah untuk membangun ekonomi yang sebanding dengan sumber daya manusia, dan memaksimalkan manfaat sumber daya alam dan kelembagaan (Munir, 2017).

Berdasarkan beberapa uraian pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah usaha partisipatif pemerintah lokal, organisasi lokal, dan masyarakat melalui pemanfaatan potensi atau sumber daya lokal secara optimal dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan agar mendorong, dan memelihara aktivitas perekonomian yang berkelanjutan.

b. Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Blakely & Leigh (2010) menjelaskan tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai berikut:

- 1) Memberikan pekerjaan yang bagi penduduk lokal, hal ini berkembangnya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat;
- 2) Mencapai stabilitas ekonomi, hal ini dapat terjadi dengan adanya peningkatan akses dari masyarakat terhadap kebutuhan untuk mendukung perkembangan bisnis;
- 3) Membangun basis perekonomian dan pekerjaan yang beragam, hal ini berarti terdapat basis kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan untuk bekerja yang kontinyu bagi masyarakat;

- 4) Meningkatkan keberlanjutan kawasan, terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang ramah lingkungan.

c. Indikator Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Blakely & Leigh (2010) menjelaskan keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- 1) Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;
- 2) Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;
- 3) Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran;
- 4) Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal

d. Prinsip Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Joseph (2002) mengemukakan prinsip utama yang mendasari Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), yaitu:

- 1) Kemiskinan dan pengangguran ialah tantangan utama dalam suatu wilayah, sehingga strategi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diharuskan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan;
- 2) Target awal Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan penduduk miskin, masyarakat marginal, dan UMKM untuk mengikutsertakan mereka aktif berpartisipasi dalam perekonomian wilayah;
- 3) Setiap wilayah memerlukan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sendiri yang merupakan cara terbaik sesuai wilayah tersebut;

- 4) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) memiliki prinsip kepemilikan lokal dan pembuatan keputusan bersama;
- 5) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) mencakup kemitraan lokal, nasional dan internasional antara masyarakat, pebisnis, dan pemerintah untuk mengatasi masalah, menciptakan usaha bersama, dan membangun wilayah lokal;
- 6) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) mencakup berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu pendekatan komprehensif untuk membangun suatu wilayah lokal;
- 7) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai pendekatan yang luwes untuk merespons perubahan kondisi pada tingkat local, nasional dan internasional.

Syakur (2013) berpendapat bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), yaitu:

- 1) Prinsip ekonomi;
- 2) Prinsip kemitraan;
- 3) Prinsip kelembagaan.

2.4 Teori tentang Desa Wisata

a. Pengertian Desa Wisata

Kawasan pedesaan yang menawarkan daerah pemukiman penduduk dengan suasana asri yang memperlihatkan keaslian wilayah tersebut baik dari segi keseharian, kehidupan sosial masyarakat, adat istiadat, budaya dan tradisi disebut dengan desa wisata. Desa wisata juga dikenal dengan bentuk bangunan dan tata ruang wilayah pedesaan yang unik atau khas, atau juga terdapat kegiatan perekonomian yang sudah sejak dulu dijalankan di wilayah tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi kalangan luar untuk melihat ataupun menikmati karena

memiliki potensi lokal untuk dikembangkan. Potensi tersebut menjadi daya dukung terciptanya pariwisata dengan nuansa pedesaan atau biasa disebut dengan desa wisata, dapat berupa cinderamata, makanan lokal, atraksi atau pertunjukan lokal, sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, ataupun kebutuhan wisata lainnya (Supriadi dan Nanny, 2016).

Pendapat di atas juga didukung oleh pernyataan Nuryanti (2016) yang menyebutkan bahwa di dalam desa wisata terbentuk gabungan atau kombinasi dari fasilitas atau sesuatu yang dibutuhkan, atraksi atau sesuatu yang menjadi daya tarik tersendiri, dan sarana prasarana pendukung. Desa wisata tidak terlepas dari tata kehidupan masyarakat dimana terikat atau menjadi satu kesatuan dengan aturan ataupun tradisi yang berlaku.

Sebuah desa dapat disebut desa wisata apabila memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi wisata. Potensi tersebut dapat berupa; pertama, tradisi maupun kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas dan daya tarik sebuah desa; kedua, aksesibilitas dan sarana prasarana yang dapat mendukung terlaksananya program desa wisata; ketiga, keamanan yang terjamin agar seluruh pihak tidak merasa dirugikan dan untuk kenyamanan bersama; keempat, terjaganya ketertiban baik dari masyarakat lokal ataupun wisatawan yang berkunjung sehingga perlu adanya peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati bersama sebagai dasar acuan pelaksanaan program desa wisata; dan kelima yaitu kebersihan lingkungan yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan daerah atau kawasan penduduk dengan nuansa pedesaan yang

menawarkan suasana asri dan asli dari kegiatan penduduk dimana hal tersebut merupakan kegiatan rutin sehari-hari masyarakat dengan tatanan wilayah berciri khas atau unik, baik dari karakteristik bangunan maupun potensi lokal yang ada sehingga menjadi daerah tujuan wisata dimana wisatawan tertarik untuk berkunjung.

Sebuah desa dapat ditetapkan menjadi desa wisata apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Priasukmana dan Mulyadin (2021) menjelaskan persyaratan tersebut, antara lain:

- 1) Aksesibilitas yang baik sehingga wisatawan dapat dengan mudah untuk mencapai titik lokasi wisata;
- 2) Memiliki objek wisata yang menarik, baik wisata alam, seni dan budaya, legenda atau sejarah awal, makanan khas, dan sebagainya;
- 3) Adanya keramah tamahan masyarakat lokal dan pemerintah lokal serta bersedia berpartisipasi dan mendukung terhadap wisata yang ada;
- 4) Desa yang aman dan juga nyaman untuk dikunjungi;
- 5) Tersedianya akses telekomunikasi yang baik;
- 6) Kawasan dengan iklim sejuk atau dingin;
- 7) Berhubungan atau berdampingan dengan objek wisata lain yang sudah memiliki nama atau branding cukup bagus sehingga mudah dikenal oleh masyarakat luas.

b. Prinsip Desa Wisata

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mengemukakan prinsip desa wisata, antara lain:

- 1) Keaslian: atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut;
- 2) Masyarakat setempat: merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian atau rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- 3) Keterlibatan masyarakat: masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;
- 4) Sikap dan nilai: tetap menjaga nilai-nilai kepercayaan ataupun budaya yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada; dan
- 5) Konservasi dan daya dukung: tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat serta disesuaikan dengan daya dukung atau kemampuan kapasitas desa dalam menampung wisatawan yang berkunjung.

c. Kriteria Desa Wisata

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mengemukakan kriteria desa wisata, antara lain:

- 1) Memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan atau karya kreatif);
- 2) Memiliki komunitas masyarakat;
- 3) Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
- 4) Memiliki kelembagaan pengelolaan;
- 5) Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- 6) Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

d. Kategori Desa Wisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menjelaskan bahwa terdapat empat kategori desa wisata, yaitu:

- 1) Desa wisata rintisan, dimana masih berupa potensi sebagai desa wisata. Sarana prasarana desa wisata rintisan terbilang terbatas, sehingga belum maupun masih sedikit kunjungan dari wisatawan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum sepenuhnya tumbuh;
- 2) Desa wisata berkembang, dimana sudah ada kunjungan dari wisatawan dari luar daerah. Sarana prasarana dan fasilitas juga sudah berkembang, sehingga mulai tercipta lapangan kerja bagi penduduk daerah. Selain itu juga didukung akan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata tumbuh;
- 3) Desa wisata maju, dimana masyarakatnya sadar akan potensi wisata yang ada di daerahnya. Selain itu, banyak kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Sehingga, masyarakat mampu mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis maupun kelompok kerja lokal;
- 4) Desa wisata mandiri, dimana memiliki inovasi dalam pengembangan potensi desa menjadi unit kewirausahaan mandiri. Sehingga, desa ini banyak dikenal wisatawan mancanegara dan menerapkan konsep berkelanjutan (*Sustainability*) yang diakui dunia. Sarana dan prasarana menerapkan standar internasional, minimal ASEAN serta pengolahannya secara kolaboratif *pentahelix*.

2.5 Teori tentang Praktik Pekerjaan Sosial Makro

a. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas kehidupannya dan merupakan profesi memberikan kepada klien baik individu, kelompok, dan masyarakat serta berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial yang meliputi metode dan teknik-teknik dalam pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut Zastrow (1999) dalam Dwi Heru Sukoco (1991).

Pekerjaan Sosial adalah sebuah profesi yang berorientasi terhadap aksi dan perubahan. Orang yang mempraktekkan Pekerjaan Sosial memiliki komitmen untuk menjadi sumber atau agen bagi mereka yang berjuang menghadapi beragam masalah atau memerlukan berbagai kebutuhan (Edi Suharto, 2006).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerjaan sosial pasal 1 menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah penyelenggara pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat.

b. Peran Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam memberikan pertolongan dan pelayanan dituntut menampilkan perannya secara profesional, agar dapat menjalankan semua fungsi dan tugasnya dalam melakukan pendampingan sosial, berikut merupakan beberapa peran yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah sebagai berikut:

1) Perencana Sosial (*Social Planner*)

Sebagai perencana sosial, pekerja sosial melakukan usaha penyusunan rencana dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Menjelaskan sebab akibat kemudian merencanakan perubahan.

2) Perantara (*Broker*)

Sebagai perantara, pekerja sosial membantu sasaran dalam menghubungkan dengan sumber-sumber pelayanan yang tersedia dan dapat diakses, sesuai dengan kebutuhan sasaran dan mengevaluasi efektivitas sumber dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

3) Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulan atau mendukung guna pengembangan masyarakat. Pekerja sosial juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam penyediaan fasilitas yang diperlukan maupun ketentuan sehingga dapat meringankan segala kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan

menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

2.6 Teori tentang *Community Organization and Community Development (CO/CD)*

a. Pengertian *Community Organization and Community Development (CO/CD)*

Pengembangan masyarakat (*community work*) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dengan memberikan pendayagunaan atau pengusaha sumber-sumber yang ada pada lingkungan yang ada di wilayah mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial (Suharto, 2002).

Penjelasan tersebut juga didukung mengenai pengertian *community work* yang mendefinisikan bahwa *community work* sebagai metode yang memungkinkan manusia atau orang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga berdampak atau berpengaruh terhadap proses-proses pencapaian tujuan dalam kehidupan yang nantinya memiliki pengaruh dalam berkehidupan (AMA, 1993).

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penjelasan Ajat Sudrajat yang menyatakan bahwa pengembangan masyarakat ialah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri maupun didampingi bersama dengan pihak pemerintah ataupun lembaga dari luar lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui inisiatif dan kemampuan maupun partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat mengenai *Community Organization and Community Development (CO/CD)* di atas maka dapat disimpulkan bahwa

Community Organization and Community Development (CO/CD) atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan proses untuk mengembangkan potensi maupun kekuatan yang ada di lingkungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak atau sistem sumber dalam menggali berbagai permasalahan di masyarakat, hal tersebut untuk melihat permasalahan sosial yang ada dan diatasi dengan menyambungkan kepada sistem sumber ataupun potensi yang ada untuk selanjutnya dilakukan penyusunan rencana intervensi agar nantinya intervensi dapat berjalan lebih baik secara sistematis dan terencana.

b. Strategi, teknik, dan taktik

Strategi dan taktik dalam intervensi komunitas menurut Netting (2004) dibagi menjadi tiga, yaitu kolaborasi (*collaboration*), kampanye sosial (*sosial campaign*), dan kontes (*contest*). Setiap strategi tersebut memiliki taktik-taktik tersendiri. Berikut merupakan penjelasannya:

1. Kolaborasi

Kolaborasi menyiratkan hubungan kerja dimana kedua belah pihak atau sistem aksi dan sistem target setuju bahwa perubahan harus terjadi. Sistem target setuju atau mudah diyakinkan untuk ikut menyetujui dengan sistem tindakan yang diperlukan dan mendukung alokasi sumber daya. Taktik yang dapat digunakan yaitu:

a) Taktik Implementasi

Implementasi digunakan ketika sistem aksi dan target bersedia untuk bekerja sama. Ketika kedua belah pihak sistem saling menyetujui bahwa perubahan

diperlukan dan alokasi sumber daya didukung oleh pembuat keputusan penting, perubahan dapat bergerak menuju implementasi atau dilakukan intervensi.

b) Peningkatan Kapasitas

(1) Partisipasi

Partisipasi mengacu pada kegiatan yang melibatkan anggota sistem klien dalam upaya perubahan.

(2) Pemberdayaan

Pemberdayaan mengacu pada langkah-langkah yang diperlukan untuk membebaskan anggota sistem klien dari hambatan atau untuk ikut partisipasi.

2. Kampanye

Kampanye yaitu sistem target bersedia berkomunikasi dengan sistem aksi, tetapi ada sedikit konsensus atau kesepakatan bersama yang diperlukan atau sistem target mendukung perubahan tetapi tidak ada alokasi sumber daya. Taktik yang dapat digunakan melalui:

a) Pendidikan

Taktik pendidikan melibatkan berbagai bentuk komunikasi dari anggota sistem aksi yang diarahkan kepada sistem target. Hal tersebut bertujuan untuk menyajikan pendapat, persepsi, sikap, dan informasi lain tentang perubahan yang diusulkan serta untuk menginformasikan kepada sistem target dengan cara mengarahkan mereka untuk berpikir atau bertindak secara berbeda tentang perubahan yang diusulkan untuk terlaksana.

b) Melobi

Melobi adalah suatu bentuk persuasi yang menargetkan pengambilan keputusan yang netral atau menentang perubahan yang diusulkan.

c) Persuasi

Persuasi mengacu pada seni meyakinkan orang lain untuk menerima dan mendukung sudut pandang seseorang tentang suatu masalah. Komunikasi yang terampil menandakan bahwa sistem tindakan dengan cermat memilih individu-individu yang memiliki kemampuan untuk membujuk orang lain sebagai tanggung jawab ataupun wewenang pemimpin.

d) Daya Tarik Media Massa

Daya tarik media massa mengacu pada pengembangan dan menyebarkan berita ke media cetak maupun elektronik untuk mempengaruhi opini publik atau masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat, telepon, SMS, email, situs web ataupun media sosial lainnya karena dirasa cara yang tepat untuk menyebarkan berita secara mudah, cepat, efisien, dan efektif.

3. Kontes

Strategi kontes digunakan dalam situasi dimana perwakilan sistem target tidak dapat dibujuk oleh sistem aksi. Hal tersebut dilakukan jika perwakilan sistem target menolak untuk berkomunikasi dengan sistem aksi atau anggota sistem target bersikap sebagai mendukung perubahan tetapi tidak melakukan tindakan maupun aksi apapun untuk memajukan atau secara diam-diam dapat melawan atau bertentangan. Taktik yang dapat digunakan ialah:

a) Aksi Kelompok Besar atau Komunitas Aksi

Mengacu pada persiapan, pelatihan, dan pengorganisasian sejumlah besar dimana orang yang bersedia atau menyetujui perubahan membentuk kelompok atau tim untuk mengadvokasi atau mempengaruhi perubahan melalui berbagai bentuk aksi kolektif atau gabungan.

b) Perundingan dan Negosiasi

Mengacu pada situasi dimana kedua belah pihak yaitu sistem tindakan dan sistem target saling berhadapan atau bertatap muka dengan alasan mendukung dan/atau meonolak terhadap rencana intervensi terkait permasalahan yang dihadapi untuk diselesaikan atau diatasi.

c) Gugatan Hukum Gugatan Kelompok

Mengacu pada kejadian dimana suatu entitas atau komponen dituntut karena dianggap melanggar hukum sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama sehingga diharapkan bahwa gugatan hukum yang ada di pengadilan terlaksa atau berlaku untuk seluruh orang atau pihak tanpa terkecuali.

2.7 Teori tentang Peningkatan Kapasitas

a. Pengertian Peningkatan Kapasitas

Secara alami, organisasi selalu berupaya mencapai tujuan mereka, mewujudkan visi dan misi melalui program-program jangka pendek, menengah, dan panjang, dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Dalam menghadapi dinamika perubahan tersebut, organisasi harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Peningkatan kapasitas sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada (Morison, 2001).

Adaptasi ini penting untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada dalam jalur mencapai visi dan misinya, dan bahkan lebih penting lagi, untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu cara untuk menghadapi perubahan ini sesuai dengan tuntutan zaman adalah melalui pembangunan kapasitas (*capacity building*).

Menurut Millen (2012:19), kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Millen juga menganggap bahwa *capacity building* merupakan tugas yang spesifik karena berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa *capacity building* merupakan proses atau kegiatan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau sistem agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Tujuan dari *capacity building* adalah untuk memastikan bahwa entitas tersebut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.

Perubahan lingkungan baik dari luar maupun dalam menjadi tuntutan yang memaksa organisasi untuk secara berkesinambungan mengambil sikap yang sesuai

untuk menghadapi tantangan yang dapat mengancam eksistensinya. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas diarahkan untuk memperkuat adaptasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Peningkatan Kapasitas

Tujuan dari peningkatan kapasitas dapat dijelaskan sebagai berikut seperti yang dikemukakan oleh Daniel Rickett dalam Hardjanto (2006) yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Pemantauan tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan tanggung jawab;
- 3) Mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah dan lainnya;

Sejalan dengan hal tersebut Keban (2008) juga menjelaskan tujuan dari peningkatan kapasitas dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Secara umum, tujuannya untuk mencapai keberlanjutan dalam suatu sistem.
- 2) Secara khusus, tujuannya ialah untuk meningkatkan kinerja dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - (a) Meningkatkan efisiensi dalam menggunakan waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan;
 - (b) Meningkatkan efektivitas melalui usaha yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan;
 - (c) Meningkatkan responsifitas dengan menyelaraskan kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut;
 - (d) Meningkatkan pembelajaran yang berfokus pada kinerja individu, kelompok, organisasi, dan sistem secara keseluruhan.

Tujuan peningkatan kapasitas adalah untuk memungkinkan individu atau kelompok maupun organisasi tumbuh lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misinya, sehingga tersedia tenaga teknis dan tenaga profesional. Secara rinci, berikut beberapa tujuan dilakukannya peningkatan kapasitas:

- 1) Melaksanakan fungsi-fungsi mendasar, memecahkan masalah, menetapkan dan mencapai tujuan;
- 2) Memahami kebutuhan pengembangan diri dalam suatu lingkungan yang lebih luas dan berkelanjutan.

c. Karakteristik Peningkatan Kapasitas

Gandara (2008) menyebutkan peningkatan kapasitas memiliki karakteristik sebagai berikut :

- (1) Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan;
- (2) Dibangun dari potensi yang telah ada;
- (3) Memiliki esesensi sebagai sebuah proses internal;
- (4) Mengurus masalah perubahan;
- (5) Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik.

Dari penjelasan indikator-indikator yang telah disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan bukan hanya dengan tujuan untuk mencapai hasil akhir semata saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan kapasitas adalah suatu proses pembelajaran yang terus menerus berlanjut agar organisasi atau sistem dapat tetap eksis dan bertahan menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.